

PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA TANAH LONGSOR MELALUI KELOMPOK KAMPUNG SIAGA BENCANA

Amran

Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat

amranhadjaratin@gmail.com

Abstract

Indonesia is a region that has the potential to disasters. The research objectives determine the level of community participation. The scope of the research: include characteristics and social facts that exist in the community which is associated with increased community participation in landslide disaster risk reduction. According to Ach. Wazir Ws., Et al. (1999: 29) participation can be interpreted as a conscious person's involvement in social interaction in specific situations Act No 24 (2007) is a series of mitigation efforts to reduce disaster risk, through physical development or awareness and capacity building in facing the threat of disaster. Tukino et al (2009) the role of social work practice in risk reduction can be through the pre-disaster phase (prevention, mitigation, preparedness and early warning). The method used are a qualitative research with action research design, data collection techniques: documentation study, interviews, observation and discussion. The results showed that, community participation increased, increasing participation indicators of community behavioral changes such as the formation of Disaster Preparedness Village, the implementation of disaster management activities, enthusiastic citizens in participating in activities of mutual cooperation and environmental preservation. Discussion, the initial description of the public participation, the need for increased participation, action plan, implementation of the action, the evaluation process and the evaluation of results and reflections. Conclusions, the improvement of community participation, disaster prevention needs special attention from the local authorities in the implementation and sustainability of independent community conditions so that the bottom level of problem solving can be done by the community independently

Key words: community participation, landslide disaster, disaster risk reduction

Abstrak

Indonesia merupakan wilayah yang berpotensi terhadap terjadinya bencana. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana. Ruang lingkup penelitian meliputi karakteristik dan fakta-fakta sosial yang ada dalam komunitas, terkait dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana tanah longsor. Menurut Ach. Wazir Ws., et al. (1999: 29) partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar kedalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tukino dkk (2009) menyebutkan bahwa peranan praktik pekerjaan sosial dalam pengurangan risiko bisa melalui tahap prabencana (pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan penelitian tindakan (*action research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: studi dokumentasi, wawancara, observasi dan diskusi. Gambaran awal partisipasi masyarakat dilihat dari kebutuhan dalam peningkatan partisipasi, rencana tindak, pelaksanaan tindakan, evaluasi proses, dan evaluasi hasil dan refleksi. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana meningkat Indikator peningkatan partisipasi dilihat dari perubahan

perilaku masyarakat seperti terbentuknya Kampung Siaga Bencana, terlaksananya kegiatan penanggulangan bencana, antusias warga ikut serta dalam kegiatan, kegotongroyongan, dan pemeliharaan lingkungan. Penanggulangan bencana perlu ada perhatian khusus dari pemerintah setempat dalam pelaksanaan kegiatan serta keberlanjutan kondisi masyarakat yang mandiri sehingga penyelesaian masalah ditingkat bawah bisa dilakukan oleh masyarakat secara mandiri.

Kata kunci: partisipasi masyarakat, bencana tanah longsor, pengurangan risiko bencana

Pendahuluan

Kehilangan akibat bencana akan menimbulkan konsekuensi berat untuk terus bertahan hidup terutama bagi mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan, serta sulit memajukan pembangunan daerahnya. Risiko bencana menjadi suatu perhatian dan kepedulian bagi hampir seluruh dunia karena akan membawa dampak yang besar seiring dengan semakin meningkatnya kerentanan akibat perubahan demografi, kondisi sosial ekonomi, urbanisasi yang tidak terencana, pembangunan di zona-zona yang berisiko tinggi, keterbelakangan, kerusakan lingkungan, variabilitas iklim, perubahan iklim, bahaya geologi, kesalahan teknologi, persaingan untuk mendapatkan sumber yang langka dan dampak epidemik.

Bencana yang terjadi dapat menyebabkan kerugian materi, fisik hingga nyawa serta dapat menyebabkan luka yang mendalam bagi korbannya. Banyak pihak yang kurang menyadari pentingnya mengelola bencana dengan baik. Salah satu adalah karena bencana belum pasti terjadi dan tidak diketahui kapan terjadi. Sebagai akibatnya, manusia sering kurang peduli, dan tidak melakukan langkah pengamanan dan pencegahan terhadap berbagai kemungkinan yang dapat terjadi. Untuk itu diperlukan sistem manajemen bencana yang bertujuan: 1) mempersiapkan diri menghadapi semua bencana atau kejadian yang tidak diinginkan, 2) menekan kerugian dan korban yang dapat timbul akibat dampak suatu bencana atau kejadian, 3) meningkatkan kesadaran semua pihak dalam masyarakat atau organisasi tentang bencana sehingga terlibat dalam proses penanganan bencana, 4) melindungi anggota masyarakat dari bahaya atau dampak bencana

sehingga korban dan penderitaan yang dialami dapat dikurangi.

Pendekatan penanggulangan bencana saat ini telah bergeser dari upaya-upaya respon aktif atau tanggap pada saat terjadi bencana menjadi pencegahan risiko pada tahap prabencana. Perubahan paradigma penanggulangan bencana dari kedaruratan menjadi kesiapsiagaan menuntut masyarakat untuk lebih memaksimalkan dalam penanggulangan bencana. Salah satunya adalah memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. Saat ini sudah ada pengakuan internasional bahwa upaya-upaya untuk meredam risiko harus dipadukan secara sistematis di dalam kebijakan dan perencanaan pada program-program pembangunan, dengan melihat dari tinjauan strategi Yokoham yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana.

Pengurangan risiko bencana merupakan suatu pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengkaji dan mengurangi risiko-risiko bencana, mengurangi kerentanan sosial ekonomi terhadap bencana dan menangani bahaya lingkungan dan bahaya lain yang menimbulkan kerentanan. Pengurangan risiko bencana di Indonesia dilakukan dengan mempertimbangkan aspek berkelanjutan dan partisipasi dari semua pihak terkait. Upaya ini dilakukan dengan komitmen yang kuat dengan mengedepankan tindakan-tindakan yang harus diprioritaskan. Penyusunan prioritas ini dilakukan untuk membangun dasar yang kuat dalam melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana yang berkelanjutan serta mengakomodasikan kesepakatan internasional dan regional dalam

rangka mewujudkan upaya bersama yang terpadu.

Tujuh target prioritas pengurangan risiko bencana yang harus dilakukan menurut Kerangka kerja Sendai 2015-2030 untuk membangun ketahanan bangsa-bangsa dan masyarakat terhadap bencana adalah: (1) Pengurangan kematian rata-rata per 100 k. (2) Mengurangi orang-orang yang terdampak per 100 k. (3) Mengurangi kerugian ekonomi/GDP. (4) Mengurangi kerusakan infrastruktur kunci. (5) Meningkatkan jumlah Negara dengan strategis dan rencana pengurangan risiko bencana. (6) Meningkatkan kerjasama internasional. (7) Meningkatkan cakupan dan akses terhadap EWS.

Kerangka kerja Sendai juga mengeluarkan empat tindakan prioritas dalam upaya pengurangan risiko bencana sebagai berikut: (1) Memahami risiko bencana, Kebijakan dan praktek harus didasarkan pada pemahaman kerentanan, kapasitas, paparan, karakteristik bahaya dan lingkungan. (1) Penguatan tata kelola risiko Tata kelola yang diperlukan untuk mendorong kerjasama kemitraan mekanisme, lembaga, untuk pelaksanaan PRB & SD. (3) Investasi PRB untuk Resiliensi Investasi publik dan swasta dalam tindakan struktural dan non-struktural untuk meningkatkan ketahanan sebagai pendorong inovasi, pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. (4) Meningkatkan manajemen risiko Memperkuat kesiapsiagaan, respon dan pemulihan di semua tingkatan sebagai kesempatan penting untuk PRB dan integrasinya ke dalam pembangunan.

Berdasarkan data bencana Indonesia tahun 2015 yang dihimpun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), rata-rata kejadian bencana longsor per tahun dari tahun 2011 hingga tahun 2015 adalah 850 kejadian. Selama tahun 2015 saja tercatat sebanyak 125 kali kejadian bencana longsor dengan jumlah korban meninggal 27 dan hilang sebanyak 6 jiwa, luka 355 jiwa, menderita dan mengungsi 3644 jiwa serta kerusakan rumah sejumlah 1075 unit. (BNPB, 2015).

Dari total kejadian retakan tanah di Indonesia, sekitar tujuh puluh persen bencana itu terjadi di Jawa Barat. Berdasarkan data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), tidak ada satupun daerah di Jawa Barat yang luput dari potensi pergerakan tanah. Dari 26 kabupaten di Jawa Barat, sebanyak 21 kabupaten di antaranya berpotensi besar terjadi longsor, terutama Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Majalengka, Sukabumi, Bogor, dan Cianjur yang berada pada dataran menengah dan tinggi. (Bandung. PR Minggu 21 Februari 2010).

Jawa Barat tercatat sebagai provinsi (Pusdalops BPBD Kabupaten Bandung). Di Indonesia sendiri selama tahun 2011 tercatat ada 75 kejadian longsor dengan korban meninggal dunia sebanyak 109 orang. Sejak 2005, angka kejadian longsor di Indonesia paling sering terjadi pada 2010 lalu yaitu ada sebanyak 199 kejadian dengan total meninggal dunia sebanyak 470 orang. Pada tahun 2009 terdapat 161 kejadian dengan korban 659 orang. (*detik bandung.com* 15/12/2015).

Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Surono menyebutkan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi di Indonesia yang mengalami gerakan tanah paling sering selama 2010. Hal itu disebabkan tingginya curah hujan dan alih fungsi lahan di sejumlah daerah (Bandung, Kompas. 15/12/2015). Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan semakin aktif melakukan sosialisasi tentang potensi bencana alam untuk mengurangi korban jiwa. Fenomena ini tidak pernah berubah setiap tahun. Dengan kondisi tanah yang sangat labil, ditambah curah hujan yang tinggi, akan selalu banyak terjadi gerakan tanah setiap tahun di Jawa Barat. Selama 2010, dari 186 kejadian gerakan tanah di Indonesia, 106 kejadian di antaranya terjadi di Jawa Barat. Gerakan tanah di Jawa Barat menyebabkan 79 jiwa tewas. Sebanyak 44 orang di antaranya adalah korban longsor di perkebunan teh Dewata, Ciwidey, Kabupaten Bandung, 23 Februari 2010. Sebelumnya, menurut data periode 2011-2015,

Jawa Barat tercatat sebagai daerah paling rawan. Tahun 2009 terjadi 85 peristiwa gerakan tanah dan 93 orang meninggal, sedangkan tahun sebelumnya 52 kasus dengan 28 orang tewas. Tahun 2005 terjadi 205 kasus gerakan tanah, 41 orang meninggal. Setahun kemudian terjadi 42 kasus dengan 20 korban jiwa dan tahun 2007 terjadi 14 kasus dengan 38 orang tewas. Kejadian longsor dengan intensitas tinggi di Jawa Barat masih mungkin terjadi mengingat pemicunya adalah curah hujan tinggi dan tata guna lahan yang tidak tepat. (Bandung, Kompas-Selasa, 15/12/2015) tahun 2015 tercatat 27 kejadian tanah longsor dan korban lebih kurang 12 jiwa.

Cimencyan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung yang memiliki tingkat risiko menengah-tinggi terhadap pergerakan tanah. Berdasarkan data dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi pada bulan Agustus-Desember 2014 tingkat pergerakan tanah di Kecamatan Cimencyan adalah menengah-tinggi dan kemungkinan disertai dengan banjir bandang (<http://www.vsi.esdm.go.id>). Salah satu wilayah rawan longsor di kecamatan Cimencyan yang juga merupakan lokasi yang akan dijadikan oleh peneliti sebagai lokasi penelitian adalah Kelurahan Cibeunying. Kelurahan Cibeunying pada beberapa titik lokasi merupakan wilayah yang rawan terjadi longsor.

Kelurahan Cibeunying termasuk dalam kategori menengah tinggi hal ini dapat dilihat dari gambaran umum kelurahan yang di peroleh dari profil Kelurahan Cibeunying 2014. Dimana secara geografis Kelurahan Cibeunying merupakan daerah yang berbukit dengan ketinggian 700 dpl/mdl diatas permukaan laut, tingkat kemiringan 50⁰ dan suhu mencapai 18-20⁰ C dengan curah hujan 2.500 mm dimana dengan kondisi seperti ini dapat memicu terjadinya bencana tanah longsor.

Pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*) dalam terminologi penanggulangan bencana dinamakan mitigasi (*mitigation*). Menurut MPBI, mitigasi adalah “upaya yang

dilakukan untuk mengurangi dampak dari bencana, baik secara fisik struktur melalui pembuatan bangunan-bangunan fisik, maupun non fisik structural melalui perundang-undangan dan pelatihan.

Penanganan Bencana Gerakan Tanah di Indonesia Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Yousana O. P. Siagian (2005) menyatakan bahwa tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak kebawah atau keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor dapat diterangkan sebagai berikut: air yang meresap kedalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan diatasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng.

Kemampuan sistem dalam mengorganisasi dirinya sendiri dalam karakteristik partisipasi yang diutarakan Wazir juga berkesesuaian dengan pertimbangan dalam hasil observasi penelitian tentang belum Bergeraknya forum penanggulangan bencana dan belum kompaknya masyarakat dengan forum penanggulangan bencana. Peneliti bisa mengeksplorasi lebih lanjut tentang kemampuan sistem yakni masyarakat dan forum penanggulangan bencana dalam mengorganisasi diri sehingga diharapkan muncul sinergitas yang handal antara forum penanggulangan bencana dan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana tanah longsor.

Kemampuan sistem dalam belajar dan melakukan adaptasi dalam karakteristik partisipasi yang diutarakan Wazir juga mengakomodasi harapan adanya kegiatan lanjutan seperti penghijauan ataupun kegiatan lain yang perlu dilakukan dalam menghadapi risiko bencana tanah longsor. Masyarakat diharapkan dapat selalu belajar dan beradaptasi menyiapkan mekanisme pengurangan risiko bencana seperti dengan melakukan penanaman pohon di tempat-

tempat yang rawan terjadi longsor dan memelihara lingkungan tempat tinggal dalam hal ini lebih ditekankan permasalahan pembuangan sampah dan air limbah rumah tangga.

MPBI, risiko bencana adalah kemungkinan timbulnya kerugian pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang timbul karena suatu bahaya menjadi bencana. Risiko dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda dan gangguan kegiatan masyarakat.

Oleh karena itu melihat apa yang telah dilakukan sebelumnya, maka peneliti menilai bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam menghadapi risiko bencana tanah longsor merupakan model lanjutan yang tepat. Adapun Model 1 yang dirancang pada penelitian dan akan dimodifikasi untuk menjadi Model 2.

Menurut Effendy, ada dua bentuk partisipasi, yaitu partisipasi vertikal dan horisontal. 1) Partisipasi vertikal adalah bentuk kondisi tertentu vertikal di masyarakat yang terlibat di dalamnya atau mengambil bagian dalam program pihak lain, sehubungan dengan yang masyarakat ada sebagai posisi bawahan. 2) Partisipasi horizontal dimana orang tidak mungkin memiliki inisiatif dimana setiap kelompok anggota /masyarakat berpartisipasi secara horizontal antara satu sama lain, baik dalam melakukan bisnis bersama-sama, dan melakukan kegiatan dengan pihak lain. menurut Effendi sendiri, tentu saja, partisipasi merupakan tanda awal dari komunitas yang berkembang yang mampu berkembang secara mandiri.

Bencana menghambat pengembangan sosial ekonomi dan upaya-upaya pembangunan lingkungan, sehingga perlu upaya-upaya untuk mengetahui bagaimana kekeliruan pengelolaan lingkungan dapat mengubah pola-pola kerentanan dan bahaya, yaitu: a) Perencanaan Tata Guna Lahan. Dalam pengelolaan Risiko Bencana, ada kebutuhan

untuk mengenali hubungan antara pertumbuhan penduduk, kebutuhan fisik terhadap pemukiman manusia, perencanaan ekonomi serata tata guna lahan yang tersedia dengan cara yang setepat-tepatnya. b) Mendirikan Bangunan yang aman dan Perlindungan fasilitas-fasilitas penting. Beberapa jenis kerentanan yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana berhubungan dengan dimana dan bagaimana kondisi fisik tempat tinggal penduduk sejak penduduk mendirikan bangunan untuk berdiam dan bekerja serta sejak adanya unsur-unsur penting dalam sistim prasarana yang mendukung dasar ekonomi dan sosial semua masyarakat, telah ada perhatian dan investasi untuk melindungi fasilitas-fasilitas yang penting itu sendiri. c) Perangkat Keuangan dan Ekonomi. Pendanaan untuk pengurangan risiko bencana telah menjadi satu isu yang sangat penting mengingat meningkatnya kebutuhan dalam investasi mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di tingkat nasional dan lokal. Semakin besar biaya yang harus dipikul karena bencana, sangat besarnya kerugian yang harus di tanggung perusahaan-perusahaan asuransi dan tekanan fiskal yang dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana telah membuat perlunya pengaturan pendanaan yang berkelanjutan untuk menangani risiko-risiko bencana. d) Sistem Peringatan Dini, Tujuan dari peramalan bahaya dan sistem-sistem peringatan dini adalah untuk menekan jumlah korban jiwa dan harta benda, oleh karena itu mereka menjadi elemen-elemen kunci dalam segala strategis pengurangan bencana. Untuk bisa melayani penduduk secara efektif, sistem-sistem harus terpadu dan menghubungkan semua aktor dalam rantai peringatan dini termasuk komunitas ilmiah dan teknis, kewenangan publik dan komunitas setempat. Penting untuk memastikan adanya komunikasi yang akurat, tepat waktu, bisa diandalkan dan menyeluruh. (Bastien Affeltranger, dkk. 2008:155).

Ada tiga faktor penting yang harus diperhatikan dalam upaya pengurangan risiko bencana antara lain: 1) Ancaman: ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana). Sesuai dengan definisi diatas, ancaman merupakan faktor yang penting diperhatikan dan dikelola dengan baik agar upaya pengurangan risiko dapat diminimalisir, adapun yang dimaksud dalam ancaman dalam penelitian ini adalah ancaman dari bencana tanah longsor. 2) Kerentanan/ rawan: rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Adapun yang dimaksud dengan kondisi yang rentan adalah, perilaku masyarakat yang buruk dalam memelihara lingkungan sekitar, seperti pembuangan sampah sembarangan, air limbah rumah tangga tidak teratur, mendirikan bangunan di wilayah yang miring atau terjal, saluran air tersumbat akibat dan menyempit. 3) Kapasitas/ kemampuan. Kapasitas adalah kemampuan atau kekuatan yang di miliki oleh masyarakat dalam menghadapi masalah yang ditimbulkan oleh alam maupun manusia itu sendiri, contoh sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi. Maskun 1999 (Adi Fahrudin.2005.153).

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran awal tingkat partisipasi masyarakat terhadap upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor, yaitu: 1) Gambaran tingkat partisipasi masyarakat dalam mengorganisasikan diri dalam upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor. 2) Mengetahui faktor pendorong partisipasi masyarakat terhadap upaya pengurangan risiko bencana

tanah longsor. 3) Mengetahui faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor. 4) Untuk mengetahui kebutuhan masyarakat dalam peningkatan partisipasi masyarakat terhadap risiko bencana tanah longsor. 5) Merancang program peningkatan partisipasi masyarakat terhadap risiko bencana tanah longsor kepada komunitas yang menjadi populasi penelitian. 6) Mengimplementasikan model intervensi kepada komunitas yang menjadi populasi penelitian. 7) Melakukan evaluasi dan mendapatkan gambaran mengenai model intervensi yang telah diimplementasikan.

Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan manfaat: a) Manfaat teoritis: penelitian ini memberikan manfaat teoritis yaitu: 1) Memperkaya konsep peningkatan partisipasi dalam upaya pengurangan risiko bencana khususnya pada tahap pra bencana. 2) Menjadi alternatif cara pandang untuk membedah masalah-masalah yang berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap bencana tanah longsor. b) Manfaat praktis: penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis: 1) Menjadi alternatif cara pandang untuk membedah masalah-masalah peningkatan partisipasi yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana. 2) Sebagai referensi bagi para perencana program penanganan bencana dalam menyusun strategi, tahapan dan langkah-langkah kegiatan pengurangan risiko. 3) Sebagai pedoman dalam kegiatan pelayanan publik sesuai bidang tugas peneliti.

Ruang lingkup penelitian ini meliputi karakteristik dan fakta-fakta sosial yang ada dalam komunitas warga di Kampung Cibuntu Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, terkait dengan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap risiko bencana tanah longsor. Peningkatan partisipasi yang dimaksud adalah peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai potensi dan risiko bencana, tingkat partisipasi

masyarakat mengorganisasi diri dalam mengurangi risiko bencana, dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam menyiapkan mekanisme pengurangan risiko bencana tanah longsor berbasis penguatan ekonomi.

Keterbatasan dalam penelitian adalah sebagai berikut: a) Penelitian kualitatif yang dilakukan tidak dapat digeneralisasikan pada kondisi yang berbeda karakteristik dengan objek yang diteliti. b) Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif di tingkat kampung yang spesifik, oleh karena itu hasil temuannya tidak dapat digeneralisasikan pada daerah lain yang memiliki karakteristik berbeda, disamping itu penelitian ini berbasiskan pada kegiatan praktikum yang telah dilakukan sebelumnya sehingga hasil temuannya belum tentu dapat direplikasikan di tempat lain.

Metode Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang partisipasi masyarakat lokal secara detail dan mendalam terhadap risiko bencana. Hal ini karena pada tingkat masyarakat lokal yang dibutuhkan informasi yang sangat spesifik sehingga digunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi (Sugiyono:2005).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan (*action research*). Penelitian tindakan dipilih karena penelitian ini dimulai dengan adanya refleksi awal dari hasil penelitian sebelumnya (model awal) yang selanjutnya dilakukan tahap perencanaan kemudian tindakan observasi dari kegiatan yang telah direncanakan hingga tersusun suatu model peningkatan partisipasi masyarakat terhadap risiko bencana. Menurut Kemmis dalam Nurul Zuriyah (2006)

menyatakan bahwa penelitian tindakan merupakan upaya menguji cobakan ide-ide kedalam praktik untuk memperbaiki atau mengubah sesuatu agar memperoleh dampak nyata dari situasi. Selanjutnya Kemmis dan Taggart dalam Nurul Zuriyah (2006) juga menyatakan bahwa penelitian tindakan adalah suatu bentuk penelitian reflektif diri yang secara kolektif dilakukan peneliti dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran dan keadilan praktik dan terhadap situasi tempat dilakukan praktik-praktik tersebut.

Secara umum menurut Nurul Zuriyah (2005:75) langkah-langkah atau prosedur penelitian tindakan meliputi 8 (delapan) tahapan: 1) Tahapan I: Identifikasi-evaluasi-formulasi masalah yang dipandang kritis, 2) Tahap II: Diskusi pendahuluan dan perundingan diantara kelompok yang berminat dan terlibat yang berakhir dengan suatu draf usulan dan persoalan-persoalan yang perlu dijawab, 3) Tahap III: Kajian pustaka, jurnal penelitian yang relevan dengan sasaran, prosedur, dan masalahnya, 4) Tahap IV: Modifikasi atau redefinisi rumusan awal masalah, 5) Tahap V: pemilihan prosedur penelitian, penetapan sampel, administrasi penelitian dan tindakannya, pemilihan bahan, alokasi sumber daya dan tenaga, 6) Tahap VI: Pemilihan prosedur evaluasi, melaksanakan prinsip kontinuitas, dan menetapkan penelitian tindakan, 7) Tahap VII: Melaksanakan proyek penelitian tindakan, 8) Tahap VIII: Pemaknaan data, penarikan inferensi dan penilaian seluruh proyek penelitian. Sedangkan operasional tindakan (Tahap VII) dijabarkan menjadi 4 (empat).

Penjelasan Istilah: (1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat adalah tingkat keikutsertaan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana termasuk tekanan sosial ekonomi yang dihadapinya, kesadaran masyarakat dalam mengorganisasi diri dalam mengurangi risiko, serta kemampuan masyarakat dalam belajar dan beradaptasi menyiapkan mekanisme pengurangan risiko bencana tanah longsor di Kelurahan Cibeunying. (2) Pengurangan Risiko Bencana (PRB) adalah

Upaya mitigasi untuk mengurangi risiko bencana dan timbulnya konsekuensi yang merusak atau kerugian yang sudah diperkirakan (hilangnya nyawa, cederanya orang-orang, rusaknya harta benda, terganggunya penghidupan, dan aktivitas ekonomi atau rusaknya lingkungan) yang diakibatkan oleh interaksi antara bahaya yang ditimbulkan alam atau diakibatkan manusia serta kondisi yang rentan. (3) Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat (4) Tanah Longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak kebawah atau keluar lereng yang ada di Kelurahan Cibeunying.

Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa Kelurahan Cibeunying termasuk dalam kategori daerah menengah tinggi untuk kejadian gerakan tanah (longsor) menurut data PVMBG. Peneliti akan masuk dalam dimensi partisipasi masyarakat terhadap risiko bencana tanah longsor di Kelurahan Cibeunying kecamatan Cimenyan kabupaten Bandung. Hal ini dilakukan untuk melihat pengetahuan masyarakat terhadap risiko bencana tanah longsor termasuk tekanan sosial ekonominya, kemampuan masyarakat dalam mengorganisasi diri dan kemampuan masyarakat belajar dan beradaptasi dalam menyiapkan mekanisme pengurangan risiko bencana tanah longsor.

Penetapan Kampung Cibuntu sebagai lokasi penelitian dengan alasan bahwa lokasi tersebut merupakan tempat wilayah rawan bencana tanah longsor.

Sumber Data

Sumber data: (1) Sumber data primer. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber yang langsung memberikan data kepada peneliti. Data yang langsung diperoleh peneliti di lapangan dari warga yang tinggal di daerah rawan bencana tanah longsor di Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data. Sumber data dipilih secara *purposive*, artinya terwakili sesuai tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini sumber data primer adalah Tokoh Masyarakat, Pengurus RW dan RT, pengurus PKK, pengurus LPM serta pihak yang mempunyai keterkaitan dalam pengurangan risiko bencana tanah longsor. (2) Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Sumber data diperoleh lewat dokumen seperti laporan hasil praktikum yang telah dilakukan sebelumnya, profil dan data kelurahan, laporan hasil penelitian, buku-buku literatur yang relevan dengan partisipasi. Data sekunder digunakan sebagai referensi untuk melakukan proses penelitian di lapangan, untuk menganalisa data dan untuk merancang model intervensi.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Teknik *purposive* adalah teknik penentuan informan yang dilakukan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Adapun pertimbangan dan tujuan tertentu dipilih berdasarkan kriteria antara lain: pertama, pengurus kampung siaga bencana di Kampung Cibuntu Kelurahan Cibeunying. Kedua, aparat kelurahan, PKK serta tokoh masyarakat yang berada di Kelurahan Cibeunying.

Karakteristik partisipan dalam penelitian ini adalah Aparat Kelurahan Cibeunying, tokoh masyarakat, kader PKK, dan beberapa warga yang tinggal di wilayah rawan longsor. Para partisipan tersebut adalah orang-orang yang peneliti anggap sebagai pihak yang benar-benar memahami tentang masyarakat Kelurahan Cibeunying khususnya warga

masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana tanah longsor di Kampung Cibuntu. Berdasarkan karakteristik diatas dapat diketahui bahwa para partisipan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dipandang representatif karena pemahaman serta pengalaman mereka terkait dengan permasalahan penelitian. Beberapa tokoh masyarakat dan aparat kelurahan merupakan tokoh kunci yang seringkali dipercaya oleh masyarakat untuk turut andil dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dalam masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data: (1) Observasi berperan serta (*participant observation*) yaitu teknik melalui pengamatan langsung terhadap obyek-obyek tertentu yang terkait dengan pengumpulan data tentang permasalahan yang akan diteliti. Data diperoleh peneliti dengan mengikuti kegiatan sehari-hari warga Cibeunying khususnya yang tinggal di daerah rawan bencana tanah longsor. Obyek yang diamati dalam proses penelitian antara lain sikap dan perilaku perangkat kelurahan dan warga, budaya, bentuk-bentuk relasi dan komunikasi diantara warga, interaksi dalam kehidupan sehari-hari dan partisipasi warga dalam kegiatan komunitas. (2) Wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada partisipan. Hal ini dilakukan untuk menggali dan mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang pemahaman warga terhadap risiko bencana tanah longsor, kemampuan warga dalam mengorganisasi diri dalam mengurangi risiko serta kemampuan warga dalam menyiapkan mekanisme pengurangan risiko bencana tanah longsor.

Penilaian warga terhadap intervensi yang pernah dilakukan pada saat penelitian dan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan warga untuk peningkatan partisipasi masyarakat. Wawancara dapat dilakukan secara perorangan kepada warga Kampung Cibuntu, Tokoh Masyarakat, Ketua Forum RW, Pengurus RW,

pengurus RT, pengurus PKK, pengurus LPM untuk mendapatkan informasi secara lengkap. (3) Studi dokumentasi dilakukan dengan meneliti berbagai laporan dan catatan yang relevan dengan karakteristik, profil dan masalah yang dihadapi oleh komunitas. Studi dokumentasi juga dilakukan untuk menelaah referensi yang berkaitan dengan bencana tanah longsor, partisipasi masyarakat, sekaligus membandingkannya dengan kondisi riil dilokasi penelitian. (4) Diskusi Kelompok Terfokus atau *Focus Group Discussion* (FGD)/ Diskusi kelompok dilakukan dengan tujuan mengungkap pandangan warga mengenai masalah dan kebutuhan yang dihadapi dalam kehidupannya sehari-hari.

Diskusi juga bertujuan untuk mengungkap pandangan warga mengenai kekuatan dan peluang yang bisa digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap risiko bencana tanah longsor. Selain untuk mengungkap pandangan warga, salah satu tujuan diskusi adalah untuk melakukan verifikasi dan menguji keabsahan beberapa jenis data.

Pembahasan

Berdasarkan profil Kelurahan Cibeunying dan hasil observasi/ pengamatan peneliti, Kelurahan Cibeunying memiliki topografi dataran tinggi bergelombang dengan kemiringan yang bervariasi, ada wilayah yang cukup datar, sedikit berbukit bahkan terdapat beberapa wilayah yang memiliki kemiringan yang cukup tinggi.

Kelurahan Cibeunying memiliki curah hujan cukup tinggi hingga 2.500 Mm dan mengalami musim penghujan cukup lama hingga 8 bulan. Rata-rata ketinggian daratan di Kelurahan Cibeunying mencapai 700 Mdpl. Terdapat 17 RW di Kelurahan Cibeunying yang memiliki potensi Tanah longsor. Data ini tentu cukup penting bagi praktikan untuk bisa ditindaklanjuti sebagai salah satu wilayah rawan bencana.

Pola pemukiman warga di Kelurahan Cibeunying tersebar di beberapa titik mulai

dari daerah yang berada di jalur-jalur jalan Kabupaten yang relatif datar dengan membentuk kumpulan perumahan yang akhirnya membentuk sebuah RT/RW, kampung atau kompleks perumahan seperti kompleks Awiligar, Apartemen Awiligar, kompleks perumahan masyarakat dan perumahan umum lainnya. Kampung-kampung yang ada pada umumnya dihuni oleh warga yang masih memiliki hubungan keluarga atau pertalian darah sehingga rumah-rumah mereka pun relatif berdekatan bahkan saling menempel tanpa jarak. Ada juga kelompok warga yang tinggal di kawasan perbukitan dan daerah lereng perbukitan. Sejalan dengan perkembangan penduduk dimana kebutuhan masyarakat akan perumahan semakin banyak maka menyebabkan daerah yang memang tidak diperuntukkan sebagai pemukiman dipaksakan menjadi wilayah pemukiman warga. Kondisi geografis yang rawan ditambah dengan pola pembangunan yang kurang mengindahkan standar hunian akhirnya menjadi pemicu terjadinya kerusakan lingkungan bahkan terjadi bencana.

Tingkat pendidikan masyarakat yang terbanyak adalah lulusan SD sebanyak 7883 atau 30% dari jumlah penduduk Kelurahan Cibeunying, kemudian disusul oleh SMP yakni sebanyak 2512 atau 13,3% dan SMA sebanyak 2116 atau 12,3% dari jumlah penduduk Kelurahan Cibeunying. Namun jika lulusan D1 hingga Sarjana digabung, maka jumlah lulusan D1 hingga Sarjana memiliki jumlah komposisi penduduk terbanyak yakni 1203 atau 17,1% dari jumlah penduduk Kelurahan Cibeunying. Dengan kondisi geografis yang strategis dimana Kelurahan Cibeunying terletak dekat dengan Pusat Pemerintahan Kecamatan Cimenyan maka warga Kelurahan Cibeunying menjadi mudah dalam mengakses pendidikan yang ada dengan mudah baik di lingkup Kelurahan Cibeunying maupun Kecamatan Cimenyan. Hal ini berpengaruh pada tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Cibeunying yang komposisi penduduknya mayoritas sudah

melek huruf dan banyak yang lulusan SMA hingga Sarjana.

Mata pencaharian penduduk Kelurahan Cibeunying adalah karyawan perusahaan swasta dan Pensiunan yang mencapai hingga 31,4% dari total keseluruhan jumlah penduduk yang memiliki mata pencaharian. Dari hasil pengamatan yang praktikan lakukan, PNS, TNI, Polri, dan Pensiunan banyak terkonsentrasi di RW 08 dan RW 09 dan sebagian kecilnya menyebar di RW sekitarnya. Petani dan Buruh menjadi jumlah mayoritas dari setiap RW.

Kondisi alam Kelurahan Cibeunying yang subur dan udara yang sejuk menjadikan berbagai jenis tanaman sayuran dan buah-buahan dapat tumbuh dengan mudah dan baik di wilayah ini. Kondisi ini yang kiranya menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat Kelurahan Cibeunying sebagai petani baik itu di lahan sendiri maupun sebagai buruh tani. Di samping itu masyarakat Kelurahan Cibeunying juga memelihara ternak seperti sapi, kambing dan ayam tetapi jumlah lahan dan usaha peternakan dan pertanian sangat minim oleh karena itu warga cibeunying banyak memilih menjadi tenaga kerja di berbagai perusahaan dan dilapangan kerja lainnya.

Masyarakat Kelurahan Cibeunying sebagian besar adalah Suku Sunda yang masih memegang tradisi dan nilai-nilai seperti kebanyakan masyarakat Sunda lainnya. Demikian juga dari sisi keagamaan, masyarakat Cibeunying masih terlihat nilai-nilai religius mewarnai kehidupan Kelurahan yang sebagian masyarakatnya beragama Islam.

Pengetahuan Masyarakat tentang Risiko Bencana Tanah Longsor

Peneliti mengawali penelitian dengan meneliti gambaran awal partisipasi masyarakat terhadap upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor. Beberapa hal yang diteliti antara lain: Pengetahuan masyarakat tentang potensi dan risiko bencana tanah longsor.

Dari pertanyaan yang telah diajukan oleh peneliti kepada partisipan, terdapat beberapa keterangan yang berhasil diperoleh antara lain yang pertama: warga kurang memahami tentang potensi tanah longsor sama risiko longsor. Sosialisasi dari pemerintah yang menginformasikan tentang potensi dan risiko longsor juga belum bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat karena diadakan jarang sekali.

Warga masyarakat kebanyakan masih kurang memiliki pengetahuan tentang potensi bencana longsor di daerahnya, hal senada juga diutarakan oleh partisipan yang lain, memang masyarakat masih kurang memahami bahkan tidak tahu apa itu pengurangan risiko bencana, dengan harapan masyarakat ingin mendapatkan pengetahuan tentang itu, dengan begitu kami masyarakat menjadi memahami dengan memahami kami bisa sadar akan pentingnya penanganan permasalahan yang kami hadapi kalau kami sudah memahami dan menyadari bahwa itu penting bagi kami sebagai masyarakat tentu partisipasi untuk saling membantu dan memelihara lingkungan sekitar semakin meningkat, pemikiran partisipan ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kebanyakan masyarakat, partisipan berharap bisa membentuk suatu kelompok yang bergerak dibidang itu khususnya penanggulangan bencana dalam upaya pengurangan risiko, sebelum partisipan mengetahui kelompok-kelompok yang bergerak di bidang bencana tentu hal ini sudah diinformasikan oleh peneliti bahwa masyarakat sekitar wilayah yang rawan perlu memiliki kelompok kampung siaga bencana, peneliti menerangkan bahwa kelompok kampung siaga bencana akan lebih efektif jika kelompok ini di bentuk di tiap titik kerawanan sehingga upaya pengurangan risiko bencana bisa diminimalisir sebab masyarakat sekitar itulah yang lebih mengetahui bagaimana karakteristik daerahnya sehingga bisa dikelola dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa gambaran awal

tentang partisipasi masyarakat yakni berupa pengetahuan masyarakat tentang risiko bencana tanah longsor, kemampuan masyarakat mengorganisasi diri, dan kemampuan adaptasi masyarakat dalam menyiapkan mekanisme menghadapi bencana tanah longsor.

Adapun hasil penelitian tersebut antara lain: Pengetahuan masyarakat tentang risiko bencana tanah longsor. Berdasarkan hasil wawancara dan FGD bersama masyarakat diketahui bahwa pengetahuan masyarakat tentang risiko bencana tanah longsor masih rendah. John Twigg (2007) menjelaskan bahwa komponen-komponen yang membentuk partisipasi masyarakat salah satunya adalah pengetahuan dan pendidikan. Aspek-aspek yang terkandung dalam pengetahuan dan pendidikan antara lain: (a) Kesadaran, pengetahuan dan keterampilan-keterampilan publik (b) Manajemen dan pertukaran informasi (c) Pendidikan dan pelatihan (d) Budaya, sikap, motivasi (e) Pembelajaran dan penelitian. Untuk membentuk partisipasi masyarakat diperlukan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang risiko bencana tanah longsor. Peningkatan pengetahuan masyarakat berarti meningkatkan kesadaran masyarakat, melakukan pertukaran informasi, pendidikan dan pelatihan, perubahan budaya, sikap, motivasi dan pembelajaran. Semua hal yang harus dilakukan diatas, penting untuk mengubah pola pikir masyarakat yang belum memandang penting upaya penanggulangan bencana.

Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang risiko bencana tanah longsor berarti mengindikasikan rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya pertukaran informasi, kurangnya pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana, budaya masyarakat belum mendukung budaya masyarakat siaga bencana, sikap, motivasi masyarakat dalam penanggulangan bencana belum terbentuk dengan baik.

Pendapat John Twigg (2007) ini sesuai dengan hasil penelitian di lapangan dimana

masyarakat belum memiliki kesadaran yang tinggi untuk melakukan penanggulangan bencana. Masyarakat juga masih kurang memperoleh pertukaran informasi seputar penanggulangan bencana. Berdasarkan pernyataan partisipan dalam hasil penelitian juga menjelaskan bagaimana masyarakat masih belum memperoleh pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana. Budaya yang ada di masyarakat juga belum mendukung kondisi masyarakat siaga bencana. Menurut *Coastal Community Resilience (CCR)* dalam *How Resilient is Your Coastal Community* USAID (2007) terdapat delapan elemen dasar yang dapat mendukung meningkatnya partisipasi masyarakat. Salah satu elemen dasar tersebut adalah pengetahuan tentang risiko. Dengan pengetahuan tentang risiko, pemimpin dan anggota masyarakat mengetahui tentang bahaya dan risiko serta mempergunakannya dalam pengambilan keputusan.

Melihat hasil penelitian, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang risiko bencana tanah longsor mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat masih rendah. Mengambil pendapat CCR, pengetahuan tentang risiko menjadi faktor yang sangat penting agar pemimpin dan anggota masyarakat dapat mengambil keputusan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana Tanah Longsor

Meningkatnya partisipasi masyarakat bisa terlihat apabila ada perubahan kesadaran masyarakat yang tergabung dalam kelompok kampung siaga bencana yang akan terbentuk disetiap titik kerawanan, kelompok ini akan difasilitasi dengan ilmu pengetahuan dasar tentang penanggulangan bencana melalui penyuluhan dan dibagikan buku saku tentang kampung siaga bencana sehingga mereka kedepannya bisa memberikan informasi kepada masyarakat yang lebih luas tentang pentingnya penanggulangan bencana.

Kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan bencana alam memberi dampak positif terhadap masyarakat itu sendiri, hal tersebut diperkuat dengan terbentuknya Kampung Siaga Bencana (KSB) Kampung Cibuntu Kelurahan Cibeunying, melalui wadah itu juga mereka banyak melakukan hal-hal yang positif dan menjadi wadah silaturahmi antar anggota kelompok, juga sebagai pendidikan bagi masyarakat agar masyarakat terbiasa berorganisasi, tidak sedikit informasi tentang apa yang terjadi diluar daerahnya didapatkan oleh anggota kelompok dari wadah yang ada atau lebih dikenal dengan sebutan KSB.

Kampung Siaga Bencana (KSB) juga pernah dibentuk ditingkat kelurahan tetapi tidak berjalan, sesuai dengan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat bahwa KSB tingkat kelurahan itu dianggap tidak efektif karena selain luas wilayah mempengaruhi partisipasi masyarakat, kepentingan masing-masing masyarakat dalam mencari nafkah juga mempengaruhi untuk berpartisipasi, dengan alasan itu serta analisis kebutuhan masyarakat terhadap penanggulangan bencana yang dilakukan bersama peneliti dan masyarakat menyatakan KSB ditingkat RW dan pada titik kerawanan lebih efisien, sebab dari segi jarak dan waktu serta pengetahuan tentang kondisi wilayah sekitar menentukan dalam upaya pengurangan risiko bisa di minimalisir.

Terbentuknya KSB tingkat RW ini terbentuk disebabkan kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan bencana meningkat, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, partisipasi juga sejalan dapat terlihat sebelum dan sesudah terbentuknya KSB, hal tersebut diperkuat adanya pemeliharaan lingkungan oleh masyarakat setempat, seperti pengelolaan sampah, pembuangan air limbah rumah tangga dengan seiringnya waktu, tahap demi tahap lingkungan ditata kembali agar tidak memberi dampak yang buruk ketika musim hujan tiba, sampah tidak menyebabkan sungai dan parit tersumbat sehingga bisa menimbulkan air tergenang yang bisa meng-

akibatkan terjadinya tanah longsor, KSB juga tidak hanya focus melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana saja tetapi ikut serta pada kegiatan lain seperti gotong royong memperbaiki rumah tidak layak huni baik dilingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan RW lain yang berada dalam lingkungan pemerintahan Kelurahan Cibeunying.

Semua rangkaian kegiatan program, dari nama sampai dengan tujuan program dirembug dengan warga dengan begitu masyarakat memiliki rasa tanggungjawab dan rasa memiliki sehingga program yang berkaitan dengan upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor berjalan dengan baik dan berkelanjutan, untuk mengetahui program yang akan dijalankan sesuai dan bisa berkelanjutan peneliti menganalisa program dengan menggunakan analisis SWOT.

Kekuatan dan Peluang Strategi memanfaatkan kekuatan untuk menangkap peluang dari analisis SWOT diatas adalah sebagai berikut: a) Memanfaatkan semangat warga dalam mengikuti kegiatan untuk menarik peran yang lebih besar dari organisasi lembaga kelurahan yang ada di Kelurahan Cibeunying terlibat dalam kegiatan penanggulangan bencana. b) memanfaatkan dukungan dari tokoh masyarakat untuk meminta organisasi lembaga desa menyusun program-program pembangunan kelurahan berbasis penanggulangan bencana. c) Memanfaatkan komitmen dari pemerintah kelurahan untuk terlibat dalam kegiatan penanggulangan bencana. Pemerintah kelurahan melakukan pemantauan kegiatan dan memberikan support terhadap kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh masyarakat.

Peluang dan Kelemahan. Strategi memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan dari analisis SWOT di atas dilakukan beberapa hal sebagai berikut: a) Memanfaatkan organisasi lembaga desa yang ada untuk memberikan pelatihan dan keterampilan dalam penanggulangan bencana kepada organisasi

forum penanggulangan bencana Kampung Cibuntu. b) Memanfaatkan program-program yang disusun untuk pembangunan kelurahan agar dialokasikan bagi penanggulangan bencana di wilayah rawan bencana. c) Memanfaatkan program kelurahan siaga PKK kelurahan Cibeunying untuk sharing pengalaman bersama forum penanggulangan bencana dalam kegiatan penanggulangan bencana.

Kekuatan dan Ancaman. Strategi memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi ancaman dalam analisis SWOT di atas, maka dilakukan beberapa hal sebagai berikut: a) Adanya semangat warga dalam mengikuti kegiatan dan komitmen dari pemerintah desa bisa mengurangi ancaman tidak adanya kerjasama antara organisasi kelurahan dengan Kampung Siaga bencana. b) Terbentuknya struktur organisasi yang sesuai kebutuhan dan adanya kejelasan mengenai tugas pokok dan fungsi pengurus membantu mengingatkan dan menyegarkan skema penanggulangan bencana yang telah dibentuk.

Kelemahan dan Ancaman. Strategi mengurangi kelemahan dan ancaman dari analisis SWOT diatas, maka dilakukan beberapa hal sebagai berikut: a) Belum banyaknya pengalaman forum penanggulangan bencana dalam penanggulangan bencana dapat dilakukan dengan melanjutkan kegiatan forum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. b) Komitmen pemerintah kelurahan untuk terlibat dalam penanggulangan bencana dapat dimanfaatkan dengan meminta kelurahan memasukan dana alokasi khusus untuk penanggulangan bencana. c) Kerjasama yang telah dibangun perlu dijaga dengan adanya pertemuan rutin antara pengurus Kampung Siaga bencana dengan organisasi kelurahan seperti PKK, LPM dan Pemerintah Kelurahan Cibeunying.

Adapun program yang dirancang dalam upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor antara lain: (1) Penyuluhan tentang penanggulangan bencana sebab akibat bencana dan simulasi PP. (2) Pembuatan jalur

Evakuasi/ pengecoran jalan, (3) Memperbaiki parit dengan sistem semen beton, (4) Membuat benteng agar tebing tidak gampang longsor dengan memasang karung berisi pasir, semua kegiatan diatas dimotori oleh kelompok kampung siaga bencana dibantu oleh masyarakat sekitar.

Simpulan

Penelitian *action research* yang dilakukan mengenai peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor melalui Kampung Siaga Bencana di Kampung Cibuntu Kelurahan Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, dilaksanakan sebagai kelanjutan dari model awal yang dihasilkan pada kegiatan penelitian dalam program peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana melalui Kampung Siaga Bencana telah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal tersebut diperkuat dari hasil evaluasi akhir terhadap pelaksanaan dan pencapaian program yang dilaksanakan bersama masyarakat, baik masyarakat yang tergabung dalam kelompok kampung siaga bencana maupun masyarakat diluar kelompok atau masyarakat yang menjadi sasaran program.

Kampung Siaga Bencana (KSB) ditingkat RW lebih efektif dalam melakukan kegiatan penanggulangan bencana dalam upaya pengurangan risiko, baik dari segi waktu, jarak, dan pengetahuan yang berkaitan dengan karakteristik wilayah, dengan adanya kelompok kampung siaga bencana ditingkat RW yang sudah terbentuk bisa membedakan

tingkat partisipasi masyarakat dimana RW yang sudah memiliki kelompok kampung siaga bencana lebih siap dan berpartisipasi dibandingkan dengan RW yang belum terbentuk atau RW yang belum memiliki KSB. Pengetahuan tentang penanggulangan bencana juga termasuk aspek yang membedakan antara kedua masyarakat yang dimaksud, dari segi pengetahuan juga dapat mendorong masyarakat dalam berpartisipasi dalam upaya pengurangan risiko bencana, apabila aspek-aspek yang membedakan antar RW diatas bisa menjadi faktor penghambat masyarakat dalam berpartisipasi sebab belum mengerti dan memahami sehingga kesadaran akan hal itu kurang akibatnya partisipasi terhambat.

Partisipasi masyarakat bisa meningkat apabila memahami suatu masalah atau program yang dilaksanakan sehingga masyarakat mengetahui kebutuhan dalam melakukan partisipasi hal tersebut sudah terlihat bahwa masyarakat mulai merasakan karena partisipasi merupakan kebutuhan bagi kehidupan bermasyarakat dengan begitu permasalahan yang dihadapi bisa diselesaikan secara berpartisipasi.

Pelaksanaan program untuk menjawab kebutuhan dan permasalahan dari masyarakat dalam upaya mengurangi risiko bencana terlaksana dengan baik dan tepat sasaran, sehingga dapat dikatakan model yang dilaksanakan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana melalui kampung siaga bencana dirasakan bermanfaat bagi peningkatan partisipasi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ach. Wazir WS dkk. 1999. *Penguatan Manajemen Lembaga Lokal Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Sekretariat Bina Desa
- Adi Fahrudin, dkk. *Pemberdayaan Partisipasi & Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press

- Aribowo. 2009. *Praktik Pekerjaan Sosial Masyarakat dalam Pengembangan Kapital Sosial Bagi Penanggulangan Bencana*, Strategi Pengurangan Resiko Bencana, Pusat Kajian Bencana dan Pengungsi STKS Bandung
- Bastian Affel Tranger, dkk. 2007. *Hidup Akrab dengan Bencana*. MPBI.
- BNPB. 2008. *Himpunan Peraturan Perundangan tentang Penanggulangan Bencana*. Jakarta
- BNPB. 2010. *Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014 Republik Indonesia*. Jakarta
- Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. 2005. *Laporan Workshop Penanganan Bencana Gerakan Tanah di Daerah Bandung*
- Edi Suharto. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama
- John Twigg, dialih bahasakan oleh Theresia Wuryantari. 2007. *Karakteristik Masyarakat yang Tahan Bencana*. Oxfam GB dan Plan Internasional
- Nurjanah, dkk. 2012. *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta
- Nurul Zuriyah. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tukino. 2009. *Kebijakan Nasional Pengurangan Resiko Bencana di Indonesia, Strategi Pengurangan Risiko Bencana*. Pusat Kajian Bencana dan Pengungsi STKS Bandung

Sumber lain:

- IDEP Foundation Org/ppbm. 2005. *Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat*
- Lembaga Penelitian STKS Bandung. 2004. *Model Peningkatan Manajemen Penanggulangan Bencana (Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat)*
- MPBI. Pengurangan Risiko Bencana 2005-1015. 2005. *Membangun Ketahanan Bangsa dan Komunitas*
- Sendai. 2015. Kerangka Kerja untuk Pengurangan Risiko Bencana. 2015-1030
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- UNISDR (*United Nation International Strategy Disaster Reduction*). 2009. *Terminologi Pengurangan Risiko Bencana*. Indonesia. Asian Disaster Reduction